

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Demokrasi hadir sebagai jawaban bagi seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan demokrasi memberi kesempatan bagi setiap orang untuk memilih dan dipilih. Dalam demokrasi dikenal dengan adanya pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata dari sebuah demokrasi. Sistem ini membuat seluruh masyarakat mempunyai suara yang setara satu sama lain. Sejak kemerdekaan Indonesia telah mengadopsi demokrasi.

Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, arus demokrasi di Indonesia semakin menguat. Pada masa Orde Baru, semua kebijakan terpaku pada pusat termasuk pemilihan kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Orde Baru yang sentralistik. DPRD melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi pilihan kepala daerah. Namun, pada akhirnya presiden yang melakukan penentuan kepala daerah (Budhiati, 2020). Reformasi 1998 menuntut adanya desentralisasi kekuasaan sehingga tidak adanya kekuatan terpusat. Hal inilah yang mendorong terciptanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya peraturan tersebut maka terbukanya pula kesempatan pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut (Aziz, 2011), pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sebuah proses politik yang bukan sekedar mekanisme politik untuk mengisi posisi demokrasi namun juga pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sebenarnya. Hal tersebut merupakan respon terhadap pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dan tidak demokratis.

Pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali digelar pada tahun 2005. Setelah sebelumnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan pemilihan lewat DPRD. Salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara

langsung pada 2005 adalah Kabupaten Sleman. Pada Pilkada Sleman 2005 diikuti oleh 4 pasangan calon. Pasangan nomor urut satu yaitu Ibnu Subiyanto-Sri Purnomo. Pasangan calon nomor urut dua yaitu Hafidh Asrom-Kusbaryanto. Lalu pasangan nomor urut tiga adalah Sukanto-Sudradjat Selorudjito, dan pasangan nomor urut empat adalah Sutrisno-Achmad Yulianto. Pada gelaran Pilkada Sleman 2005 dimenangkan oleh pasangan nomor urut satu yaitu Ibnu Subiyanto-Sri Purnomo (Detik, 2005)

Pada Pilkada Sleman tahun 2010 mengalami peningkatan calon. Sebanyak tujuh calon mengikuti perhelatan pesta demokrasi tersebut. Pasangan nomor urut satu adalah Bugiakso-Kabul Muji Basuki. Pasangan nomor urut dua yaitu Mimbar Wiryono-Cahyo Wening. Pasangan nomor urut tiga yaitu Sukanto-Suhardono. Pasangan nomor urut empat yaitu Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu. Pasangan nomor lima yaitu Zaelani-Heru Irianto Dirjaya. Pasangan nomor urut enam yaitu Hafidz Asrom-Sri Muslimatun. Sedangkan pasangan nomor urut tujuh yaitu Ahmad Yulianto-Nuki Wakinudhatun. Pilkada Sleman 2010 ini dimenangkan oleh pasangan calon nomor empat yaitu Sri Purnomo-Yuni Satya Rahayu (Kompasiana, 2011)

Gelaran Pilkada Sleman 2015 mengalami penyusutan jumlah pasangan menjadi hanya dua pasangan calon. Petahanan periode kali ini yaitu Sri Purnomo kembali maju ke kontestasi politik. Pasangan nomor urut satu yaitu Yuni Satya Rahayu-Danang Wicaksana Sulistya. Sedangkan pasangan calon nomor urut dua yaitu Sri Purnomo-Sri Muslimantun. Gelaran Pilkada ini dimenangkan oleh petahana Sri Purnomo yang kali ini berpasangan dengan Sri Muslimatun (Sindo, 2015)

Pilkada tahun 2020 diselenggarakan di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dengan total jumlah 270 daerah diseluruh Indonesia. Pilkada ini diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Salah satunya wilayah yang ikut berpartisipasi adalah Kabupaten Sleman. Pilkada Sleman tahun 2020 diikuti oleh 3 orang calon pasangan. Salah satu calonnya yaitu Kustini Sri Purnomo yang merupakan istri dari Bupati Sri Purnomo. Sri Purnomo sendiri tidak bisa mengikuti gelaran Pilkada kali ini karena

sudah 2 kali menjadi Bupati. Pasangan calon nomor urut satu yaitu Danang Wicaksana Sulistya-Agus Choliq yang didukung oleh Gerindra, PKB, dan PPP dengan jumlah 15 kursi DPRD. Pasangan calon nomor urut dua yaitu Sri Muslimatun-Amin Purnama didukung oleh partai Nasdem, PKS, dan Golkar dengan jumlah 14 kursi DPRD. Sedangkan pasangan nomor urut ketiga yaitu Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa didukung oleh PDIP dan PAN dengan jumlah 21 kursi DPRD. Pilkada kali ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut tiga yaitu Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa.

Tabel 1. 1  
Jumlah suara per kecamatan di Pilkada Sleman 2020

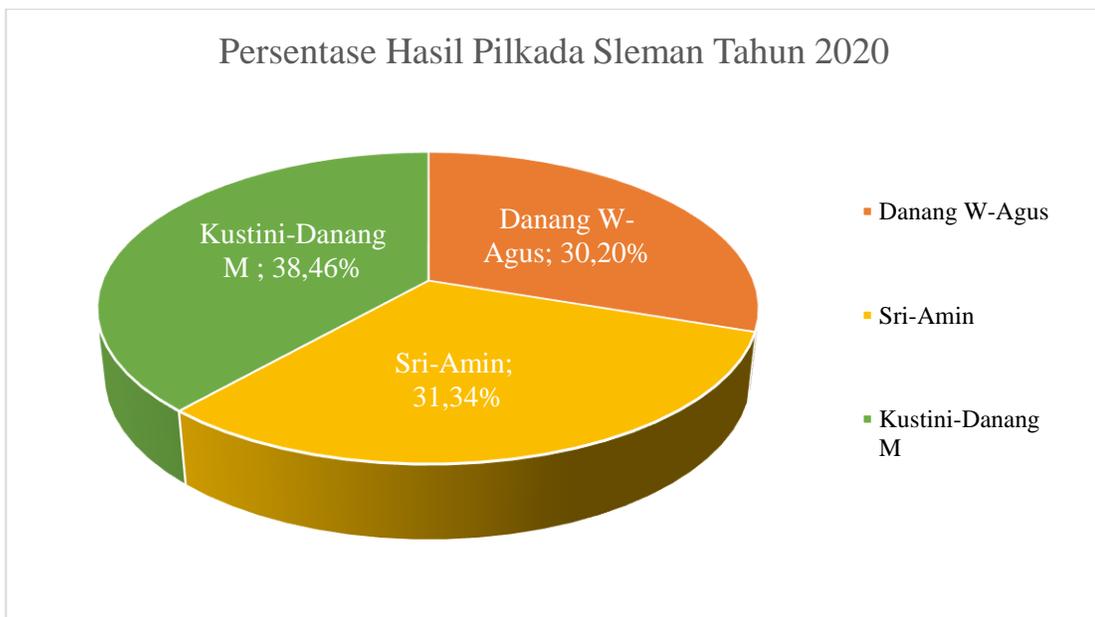
Suara Menurut Wilayah	Danang Wicaksana-Agus Choliq	Sri Muslimatun-Amin Purnama	Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa
	Suara	Suara	Suara
Berbah	8.095	10.124	10.577
Cangkringan	4.579	5.868	7.820
Depok	16.045	15.298	21.643
Gamping	12.379	16.739	17.949
Godean	10.229	12.511	15.732
Kalasan	10.105	14.182	17.111
Minggir	4.606	5.906	8.424
Mlati	11.941	19.158	15.772
Moyudan	5.676	6.921	7.467
Ngaglik	16.188	13.012	16.276
Ngemplak	11.092	10.005	10.677
Pakem	5.563	6.830	9.333
Prambanan	11.278	7.815	11.584
Seyegan	9.580	9.187	10.742
Sleman	14.601	10.001	15.093

Tempel	12.009	6.909	13.846
Turi	7.117	7.122	7.875
<b>Total</b>	<b>171.083</b>	<b>177.588</b>	<b>217.921</b>

Sumber: Diolah dari website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman

Data diatas menunjukkan jumlah suara yang didapat tiga calon pasangan di Pilkada Sleman 2020. Terlihat jumlah suara paling banyak diraih oleh pasangan nomor urut tiga yaitu Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa dengan jumlah suara 217.921. Maka dari itu, pasangan nomor urut tiga menjadi pemenang Pilkada Sleman 2020.

Gambar 1. 1  
Persentase Hasil Pilkada Sleman Tahun 2020



Sumber: Diolah dari website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman

Berikut merupakan tabel daftar Bupati Kabupaten Sleman sejak kemerdekaan Indonesia:

Tabel 1. 2  
Daftar Bupati Kabupaten Sleman sejak kemerdekaan Indonesia

No	Bupati	Periode
1	K.R.T Pringgodingrat	1945-1947
2	K.R.T Prodjodiningrat	1947-1950
3	K.R.T Dipodiningrat	1950-1955
4	K.R.T Prawirodiningrat	1955-1957
5	Buchori S. Pranotohadi	1957-1959
6	K.R.T Murdodiningrat	1959-1974
7	K.R.T Tedjo Hadiningrat	1974-1974
8	Drs. K.R.T Prodjosuyoto	1974-1985
9	Drs. Samirin	1985-1990
10	Drs. Arifin Ilyas	1990-2000
11	Drs. Ibnu Subiyanto, Akt	2000-2005
12	Drs. Ibnu Subiyanto, Akt	2005-2009
13	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.	2009-2010
14	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.	2010-2015
15	Ir. Gatot Saptadi	2015-2016
16	Drs. H. Sri Purnomo, M.Si.	2016-2021
17	Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo	2021-Sekarang

Sumber: Diolah dari website resmi Kabupaten Sleman

Dari tabel diatas terlihat bahwa sejak era kemerdekaan Indonesia sampai dengan keempat gelaran Pilkada pada tahun 2005, 2010, 2015, dan 2020, baru pada Pilkada terakhir yaitu tahun 2020 yang dimenangkan oleh calon perempuan. Kemenangan calon perempuan ini juga menjadi yang pertama dalam sejarah Kabupaten Sleman sejak Indonesia merdeka. Sejak gelaran Pilkada secara langsung yang pertama kali digelar pada 2005 juga baru periode ini Sleman dipimpin oleh bupati perempuan (Setyawan, 2021).

Di dalam penelitian ini akan membahas mengenai dua faktor yang berpengaruh dalam pemenangan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua faktor tersebut adalah modalitas dan strategi kampanye. Kedua faktor tersebut dipilih karena merupakan hal mendasar dalam sebuah kontestasi politik secara langsung. Modalitas dinilai sebagai sumber daya calon yang berguna baik secara individu maupun kelompok. Modalitas tersebut menjadi nilai tambah calon di mata pemilih. Selanjutnya faktor strategi kampanye. Strategi kampanye mempunyai peranan yang tidak kalah signifikan dalam pemenangan calon. Strategi kampanye merupakan perencanaan untuk menjual atau mempromosikan calon kepada pemilih. Strategi kampanye mempunyai maksud untuk memberi kesan positif dan menguntungkan bagi calon. Hal ini menjadi faktor yang berpengaruh terutama dalam pemilihan langsung. Kedua faktor di atas menjadi pisau analisis didalam penelitian ini karena saling berhubungan dan menjadi pengaruh yang signifikan dalam pemilihan kepala daerah langsung.

Terlebih sampai saat ini belum ada peraturan yang mewajibkan kuota calon perempuan dalam gelaran Pilkada. Ini tidak seperti peraturan dalam pemilihan umum legislatif yang mensyaratkan kuota 30% bagi perempuan. Hal ini tentu menjadi sebuah fenomena baru yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan data dan fakta di atas maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati wanita pertama di Pilkada Sleman 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diputuskan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati wanita pertama di Pilkada 2020 Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati wanita pertama di Pilkada Sleman 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis sebagai gambaran tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati di Pilkada Sleman 2020.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi masyarakat maupun partai politik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan seorang calon kepala daerah di pemilu serta dapat menjadi rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

### **E. Literature Review**

Berikut ini adalah kumpulan literatur yang diambil berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan yang relevan atau keterkaitan dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1. 3  
Literature Review

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian
1	Gender and Development (GAD): Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018 di Provinsi Jawa Timur	Susi Dian Rahayu dan Chairunnisa	2018	Keterpilihan perempuan dalam Pilkada di Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor latar belakang calon, pola rekrutmen dan kaderisasi, serta ikatan dengan akar

				rumpun masyarakat (Rahayu & Chairunnisa, 2021)
2	Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung	Muhadam Labolo, H.M. Aries Djaenuri, Teguh Ilham, dan Hasna Azmi Fadhillah	2019	Keberhasilan Gubernur terpilih Lampung dalam Pilkada Lampung dipengaruhi beberapa faktor yaitu kemampuan komunikasi politik yang efektif, jaringan sosial dan loyalitas massa, serta penyusunan prioritas target kampanye yang relevan (Labolo et al., 2019)
3	Perempuan dan Kepemimpinan Politik (Studi Terhadap Terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai Bupati di Kabupaten Luwu Utara)	Ananda Rezky Wibowo	2017	Kemenangan Indah Putri Indriani dikarenakan beberapa hal yaitu latar belakang karier sebagai akademisi dan praktisi politik, modalitas sosial dan ekonomi, serta relasi figur politik lokal (Wibowo, 2017)
4	Modalitas Kemenangan Sutinah Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Mamuju	Ahmad Ardiansyah	2019	Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan Sutinah yaitu modal sosial sebagai anak dari mantan Bupati Mamuju dan kemampuan komunikasi yang bagus, modal politik dengan dukungan 10 partai politik, serta modal ekonomi

				dengan besarnya dana kampanye (Ardiansyah, 2019)
5	Pemanfaatan Modal Sosial Paulina Haning Bullu Pada Pilkada di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018	Anastresia Mite, Mudiwati Rahmatunnisa, Sri Zul Chaeriyah	2022	Bupati terpilih berhasil menggunakan modal sosialnya yaitu jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan untuk meraih kemenangan pada gelaran Pilkada Rote Ndao 2018 (Mite et al., 2022)
6	Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang	Atiqotul Maula	2017	Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terpilihnya Hj. Munjidah, yaitu modal simbolik sebagai putri kyai, modal kultural dari lingkungan pesantren, dan modal ekonomi sebagai penyokong dana kampanye (Maula, 2017)
7	Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung	Kurniawati Hastuti Dewi, Atika Nur Kusumaningtyas, Esty Ekawati, dan Syafuan Rozi Soebhan	2018	Penelitian ini mengambil kasus Pilkada Grobogan dan Lampung bahwa kemenangan calon ditentukan oleh tiga hal yaitu modal individu (latar belakang, finansial, kemampuan sosial), strategi, dan jaringan politik (Dewi et al., 2018)
8	Relevansi Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2020	Lolly Suhenty	2020	Hasil penelitian menyebutkan bahwa setidaknya calon perempuan harus

				memiliki tiga faktor agar terpilih yaitu memiliki perspektif perempuan, lingkaran kekuasaan, dan latar belakang (Suhenty, 2020)
9	Faktor-Faktor Kemenangan Eva Dwiana-Dedy Amarullah Dalam Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020	Jenita Permata Sari	2021	Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor kemenangan yaitu latar belakang calon, ikatan kesukuan dan kepercayaan serta popularitas calon (J. P. Sari, 2021)
10	PPP dan Kepemimpinan Perempuan (Studi Atas Pemenangan Ade Munawaroh Yasin Sebagai Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2018)	Siska Andrianika	2022	Penelitian ini mengemukakan bahwa kemenangan Ade Munawaroh Yasin didukung oleh modal sosial yaitu latar belakang mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor dan keaktifan di banyak organisasi serta dukungan partai yang memiliki suara lumayan besar (Andrianika, 2022)
11	Modal Sosial dan Keterpilihan Umi Azizah Pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018	Dita Amalia Safitri dan Muhammad Adnan	2020	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa modal sosial sang bupati yaitu posisi incumbent dan latar belakang santri serta jabatan sebagai ketua PC Muslimat NU membuat Umi Azizah terpilih kembali menjadi Bupati Tegal

				(Safitri & Adnan, 2020)
12	Analisis Wacana: Modalitas Fifi-an Adeningsi Mus Dalam Pilkada Kepulauan Sula Tahun 2020	Syamsul Bahri Abd. Rasyid	2022	Hasil penelitian mengemukakan bahwa modalitas sosial didasari pada dinasti politik keluarga dan langkah menggandeng wakil dengan kekayaan tertinggi diantara calon lain (Rasyid, 2022)
13	Analisis Kemenangan Syamsari Kitta-Achmad DG Se're (SK-HD) Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Takalar 2017	Fahmi Sulthoni	2019	Kemenangan pasangan ini didasari oleh latar belakang mereka sebagai mantan anggota legislatif, dukungan Gubernur Sulsel, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana marketing sosialisasi program (Sulthoni, 2019)
14	Komunikasi Politik Chusnunia Chalim (Studi Terhadap Kampanye Politik Chusnunia Chalim Dalam Memenangkan Pemilu Pilkada Lampung Timur Tahun 2015)	Rizqie Guntur	2017	Hasil penelitian menyebutkan faktor-faktor yang mendukung kemenangannya adalah faktor elit politik, organisasi masyarakat, dan pemanfaatan segmen perempuan (Guntur, 2017)
15	Modal Politik Tjhai Chui Mie Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017	Ika Kartika, Mudiwati Rahmatunnisa, dan Neneng Yani Yuningsih	2018	Modalitas politik yang dipunyai mampu dikelola dengan baik dibuktikan dari pengalaman sebagai legislator dan dukungan partai

				politik, pemanfaatan jaringan sosial agama dan etnis (Kartika et al., 2018)
16	Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020	Sofa Marwah dan Oktafiani Catur Pratiwi	2022	Latar belakang calon menjadi faktor penting keterpilihan terutama dari sisi petahana serta sosok figur yang berkaitan dengan calon (Marwah & Catur Pratiwi, 2022)
17	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Daerah Perempuan di Kabupaten Bekasi	Siti Khodijah	2021	Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor kemenangan dipengaruhi faktor figur calon, ketokohan orang tua calon, partai pendukung, dan marketing politik (Siti Khodijah, 2021)
18	Strategi Politik Kemenangan Sitti Sutinah Suhardi Dalam Pilkada Kabupaten Mamuju 2020	Kurniawan	2022	Penelitian mengemukakan bahwa kemenangan diraih dengan modal sosial dari ayah calon yang merupakan bupati selama dua periode (Kurniawan, 2022)
19	Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019	Giseka Canna Indira S dan Chusnul Mariyah	2021	Kemenangan calon perempuan diraih dengan dukungan utama modal politik dan modal sosial, sedangkan modal ekonomi sebagai penunjang serta penguat (Indira S & Mariyah, 2021)
20	Studi Terpilihnya Bupati Luwu Utara Sebagai Kepala	Iqbal Aidar Idrus dan Ummi Zakiyah	2018	Calon yang dikenal ramah dan sederhana serta aktif di media

	Daerah Perempuan Pertama di Provinsi Sulawesi Selatan			social membuatnya terpilih di Pilkada Luwu Utara (Idrus & Zakiyah, 2018)
21	Kontestasi Politik: Strategi Pemenangan Paslon Faida-Muqit Dalam Pilkada Jember 2015	Wahidah Intania Sari	2018	Latar belakang calon, faktor figur, dan dukungan partai politik membuat calon meraih kemenangan di Pilkada Jember (W. I. Sari, 2018)
22	Kapital Politik Dalam Kontestasi Memperebutkan Kekuasaan (Study Kasus Pemenangan Pasangan Sri Hartini – Sri Mulyani Dalam Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015)	Noer Apptika Fujilestari	2019	Modal sosial yang kuat baik jaringan formal maupun informal serta dukungan partai politik PDIP dengan massa terbesar di Klaten membuat pasangan ini meraih kemenangan (Fujilestari, 2019)
23	Pandangan Intelektual Terhadap Wacana Kyai Pendukung Khofifah Indar Parawansa Dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018	Y. A. Sunaryo dan O. Jatiningih	2021	Peran dan dukungan kyai sebagai sosok figur terhadap Khofifah Indar P. memberi efek positif bagi elektabilitasnya di Pilkada Jatim (Sunaryo & Jatiningih, 2021)
24	The Use of Social Capital and the Victory of Female Representative Candidates in East Nusa Tenggara's Regional Representative Body during the 2019 Elections	Budi Chrismanto Sirait dan Audra Jovani	2022	Modal sosial para calon yang aktif di berbagai komunitas atau organisasi dan kedekatan dengan tokoh masyarakat serta budayawan mempengaruhi keterpilihan mereka (Sirait & Jovani, 2022)
25	Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu	Reninta Ananda dan Tengku Rita Valentina	2021	Modal politik dan modal sosial terbagi menjadi empat yaitu koneksi orangtua,

	Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat			dukungan partai politik, kepribadian yang cerdas dan adaptif, serta ekonomi yang kuat karena latar belakang pengusaha menjadi faktor dalam kemenangannya (Ananda & Valentina, 2021)
--	--	--	--	---

Berdasarkan kumpulan literatur review diatas terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Persamaan penelitian terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan calon pada pilkada. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada penelitian yang berfokus pada dua faktor yaitu modalitas dan strategi kampanye selain itu studi kasus yang berfokus pada Kustini Sri Purnomo dan berlokasi di Kabupaten Sleman.

## **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan judul faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati wanita pertama di Pilkada Sleman tahun 2020, maka penelitian ini menggunakan empat teori yaitu: teori modalitas, teori strategi kampanye, teori partisipasi politik perempuan, dan teori pemilu. Berikut merupakan penjabaran dari setiap teori:

### **1. Modalitas**

Dalam kontestasi politik modalitas sangat diperlukan sebagai pilar yang menunjang keterpilihan kandidat. Modalitas yang dimiliki kandidat merupakan aset yang sangat berharga dalam mengarungi pesta demokrasi. Setiap kandidat yang bertarung diperhitungkan lewat modalitas yang mereka miliki.

Menurut (Ardiansyah, 2019) Sosiolog Piere Bourdieu merupakan pencetus teori modal pertama kali. Teori tersebut dikatakan erat kaitannya dengan masalah kekuasaan. Oleh sebab itu, pemikiran Bourdieu didasarkan pada masalah dominasi. Tentu saja, dalam suatu masyarakat politik, masalah dominasi merupakan masalah utama sebagai bentuk realisasi kekuasaan. Pada prinsipnya, dominasi tergantung pada situasi, sumber daya (modal) dan strategi para pemain.

Konsep modalitas dalam kontestasi pemilihan calon anggota eksekutif dimaknai dalam bentuk modal politik, modal sosial, modal ekonomi, dan modal kultural. Namun, Pierre Bourdieu membedakan antara tiga bentuk modal, yaitu modal ekonomi, modal sosial, dan modal kultural. Modal dapat diartikan secara lebih luas dalam lingkup yang mempunyai nilai kultural dan simbolik dapat mencakup bentuk seni, pendidikan, dan bahasa. Menurut Bourdieu, kapital sebagai suatu hubungan sosial yang terkandung dalam suatu sistem pertukaran, dapat diperluas dalam bentuk barang-dagangan, baik material maupun simbolis, tanpa pembedaan, bermanifestasi sebagai sesuatu yang langka, layak untuk dicari dalam bentuk sosial. Konsepsi teori kapital Bordieu tidak terlepas dari konsep dominasi lainnya, sehingga memiliki keterkaitan dengan konsep kekuasaan yaitu habitus dan ranah (arena). Bordieu membangun teorinya dari paradigma strukturalisme genetik yang memiliki ciri-ciri internalisasi eksternalitas dan internalisasi internalitas dalam hal struktur dan agen. Bourdieu menolak paradigma objektivitas dan subjektifisme, meskipun tidak secara keseluruhan.

Modal wajib mempunyai lingkup di dalam ranah. Ini agar ranah dapat mempunyai makna. Namun pada tingkatan lain, hal tersebut dapat dijabarkan dengan rumusan generatif. Penjabaran ini sangat bermanfaat walaupun terdengar seperti artifisial. Ranah, modal, dan habitus mempunyai hubungan yang bersifat langsung. Modal, habitus, ranah mempunyai hubungan secara langsung. Modal memberikan nilai yang terhubung dengan kultural habitus

dan karakteristik sosial. Ranah dikelilingi dengan relasi kekuasaan yang objektif dan mempunyai basis material. Basis material itu menghasilkan beberapa modal yang familiar dengan ranah dan dikombinasikan dalam habitus. Dengan pemahaman tersebut, modal bisa ditukar satu sama lain, selain itu bisa diakumulasi. Akumulasi modal ini sangat vital dalam ranah.

Casey dalam (Nurlela et al., 2019) memahami bahwa modal politik sebagai pemanfaatan semua jenis modal yang dimiliki oleh aktor politik atau lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik. Dalam praktiknya, besaran modal politik yang dipunyai aktor dan institusi ada empat faktornya, yaitu: pertama; pemilu adalah alat fundamental untuk memunculkan pemimpin di sebuah demokrasi; kedua, pembuatan serta implementasi kebijakan publik; ketiga, dinamika relasi dan konflik antar aktor dan institusi politik dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik, dan keempat, opini serta persepsi publik terhadap aktor atau institusi politik. Modal politik, sebagaimana A. Hick dan J. Misra menyebutnya, merupakan berbagai titik poin yang memberikan legitimasi atau sumber daya untuk mencapai manfaat kekuasaan. (Nurlela et al., 2019)

Sedangkan modal sosial dapat dimaknai sebagai semua bentuk hubungan yang berkaitan sumber daya untuk menentukan kedudukan sosial. Dapat dikatakan bahwa modal sosial merupakan hubungan sosial yang berkualitas antar orang. Masyarakat yang saling berinteraksi antar kelas didalam strata sosial masyarakat merupakan percontohnya. Definisi modal sosial tidak dalam lingkup materi, namun lebih kepada hubungan sosial yang dimiliki setiap individu. Seperti organisasi, keluarga, dan segala hal yang dapat menuju pada arah kerjasama. Modal sosial menonjolkan kepada potensi dan pola-pola hubungan individu antar kelompok dengan fokus pada jaringan, kepercayaan, dan norma atau nilai-nilai yang sama (Ananda & Valentina, 2021)

Modal ekonomi berarti segala sumber daya yang dapat dijadikan sarana produksi dan finansial. Modal ekonomi adalah bentuk modal yang gampang diubah ke bentuk modal lainnya. Cakupan modal ekonomi antara lain materi (benda dan pendapatan), alat-alat produksi (buruh, tanah, mesin), serta uang. Modal ekonomi menurut (Firmanzah, 2010) dijabarkan secara lebih riil dalam bentuk uang. Kampanye calon dibiayai menggunakan modal ekonomi ini. Setiap calon berlomba untuk saling menonjolkan program dan visi-misi mereka sebagai kelompok yang paling mendengarkan aspirasi rakyat dan memahami persoalan negara. Mereka mengkampanyekan hal itu lewat berbagai media seperti media sosial, televisi, radio, koran, baliho, banner. Selain itu juga dengan melobi ormas, mengumpulkan massa, dan menyewa konsultan politik. Semua hal tersebut membutuhkan modal ekonomi yang besar.

Modal kultural adalah kemampuan keilmuan individu yang dapat berupa pendidikan formal atau warisan keluarga seperti pengetahuan dan keterampilan tertentu sebagai hasil pendidikan formal, penghargaan, sertifikat ataupun gelar sarjana. Selain itu contoh lain dari modal budaya adalah kemampuan menulis, bagaimana berperilaku dan pembawaan sosial, gampang bergaul yang berpengaruh pada strata sosial. Dengan demikian, modal kultural merupakan representasi keilmuan dengan logika, etika dan estetika. Hal ini biasa disebut sebagai modal dengan pengetahuan yang berdasarkan legitimasi.

Dalam kontestasi Pilkada, calon-calon yang berpeluang memenangkan pemilihan kepala daerah adalah mereka yang mempunyai dan menghimpun modalitas sebagai pilar-pilar sumber daya kekuatan mereka dalam mengarungi pesta demokrasi tersebut. Para kandidat wajib mempunyai modal utama dalam mengarungi pemilihan langsung yaitu modal politik, modal sosial, modal ekonomi, dan modal kultural. Modal politik terkait dengan dukungan partai politik. Modal sosial terkait dengan ketokohan dan jaringan. Sedangkan modal ekonomi terkait dengan kekayaan pribadi, dan dana

kampanye. Modal kultural terkait dengan pendidikan dan penghargaan. Pasangan calon kepala daerah lebih berpeluang terpilih jika memiliki kemampuan modalitas yang beragam. Probabilitas keterpilihan pasangan calon adalah kombinasi dari berbagai macam modalitas yang dipunyai. Hal ini ialah wujud dari proses yang rumit dan penuh pertimbangan dari para calon. Hal ini menunjukkan bahwa modalitas mempunyai pengaruh dan hubungan dengan kemenangan calon di pemilihan kepala daerah (Ardiansyah, 2019)

Adapun modalitas yang digunakan dalam penelitian ini terdapat empat modalitas. Modalitas ini dirasa relevan akan topik pembahasan penelitian ini. Hal ini dikarenakan modalitas merupakan salah satu pilar yang digunakan sebagai sumber daya kandidat dalam menunjang kontestasi politik. Modalitas tidak bisa hanya digunakan salah satu namun kombinasi agar semakin kuat dalam implementasinya di kontestasi politik. Keempat modalitas tersebut adalah:

a) Modal politik

Modal politik merupakan dukungan politik berupa dukungan partai Politik (koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pilkada.

b) Modal sosial

Modal sosial merupakan dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

c) Modal ekonomi

Merupakan dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk kampanye dan pemenangan pilkada.

d) Modal kultural

Merupakan kemampuan keilmuan individu yang dapat berupa pendidikan formal atau warisan keluarga seperti pengetahuan dan keterampilan tertentu sebagai hasil pendidikan formal, penghargaan, sertifikat ataupun gelar sarjana.

## 2. Strategi Kampanye

Strategi merupakan serapan kata "*Strategos*" yang berasal dari Yunani. Kata tersebut mempunyai makna "*generalship*" dalam artian segala hal yang dilakukan oleh jenderal perang, dapat disimpulkan kata tersebut dari istilah militer. Istilah tersebut berarti taktik atau cara agar memperoleh hal yang ditargetkan. Pada dasarnya, strategi adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi adalah perencanaan keberhasilan suatu tujuan dalam segala kegiatan, termasuk keberhasilan dalam peperangan, persaingan, dan lain-lain.

Menurut (W. I. Sari, 2018) kampanye politik merupakan sarana yang diusung oleh masyarakat dalam berdemokrasi untuk memutuskan jajaran yang mengatur kehidupan mereka. Semua kampanye politik merupakan dimensi kehumasan. Strategi kampanye yang tepat membutuhkan target yang jelas. Oleh sebab itu, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses komunikasi politik selama kampanye dijalankan dengan tepat dan dampak optimal. Supaya berjalan seperti yang diharapkan dalam tujuannya, kelompok pengusung harus terlibat di promosi politik mereka agar bertujuan untuk mempromosikan kandidat ini secara maksimal.

Strategi kampanye mempunyai definisi rangkaian kegiatan terencana dalam hal komunikasi untuk tujuan membuat dampak yang bersinggungan banyak orang. Proses kampanye ditargetkan dan dipentaskan selama periode tertentu. Kampanye politik menurut Yustian (2008) merupakan suatu kegiatan komunikasi yang terorganisir secara optimal diberikan atau ditunjukkan secara langsung ke arah individu-individu tertentu selama masa kampanye.

Tujuan kampanye politik adalah untuk mengatakan dan menjelaskan dari apa yang mereka usung dan dukung. Dalam kontestasi politik kampanye merupakan hal yang mendasar untuk mempengaruhi pemilih. Karena pemilu adalah dasar dari kebebasan individu, gerakan politik memperoleh legitimasinya dari makna pemilu itu sendiri (Dewi et al., 2018)

Strategi kampanye memegang peranan penting dalam kemenangan calon. Menurut (Kurniawan, 2022) di dalam sebuah pilkada strategi kampanye sangat penting untuk digunakan menarik simpati dan suara rakyat. Strategi kampanye merupakan langkah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam setiap kontestasi politik dapat dipastikan terdapat strategi kampanye yang dijalankan setiap kontestan. Strategi ini dapat di modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye mempunyai hubungan dalam setiap kemenangan calon di pemilihan kepala daerah.

Dalam mendukung langkah kandidat dalam pemilihan, setiap kandidat mempunyai strateginya kampanyenya masing-masing. Strategi ini yang nantinya sangat mempengaruhi hasil akhir kontestasi. Strategi tersebut merujuk (Nursal, 2004) disebut strategi pendekatan pasar dan dikategorikan menjadi tiga, yaitu pemasaran produk politik langsung kepada pemilih (*push political marketing*), pemasaran produk politik melalui media massa (*pull political marketing*), dan pemasaran produk politik dengan tokoh, organisasi atau kelompok yang berpengaruh (*pass political marketing*). Ketiga strategi tersebut dijelaskan berikut:

a) Pemasaran Langsung Kepada Calon Pemilih (*Push Political Marketing*)

Strategi *Push Political Marketing* merupakan pemasaran produk politik secara langsung ke calon pemilih. Dalam strategi ini tidak sekadar menjual kandidat atau partai namun lebih fokus pada hal-

hal yang mempunyai efek kepada pemilih. Cara komunikasi dalam strategi ini dapat disampaikan secara langsung oleh calon atau partai politik, atau melalui relawan dengan membagikan sticker, brosur, flyer, dan sejenisnya. Para relawan ini bertugas mengumpulkan data berupa persepsi pemilih, mengukur efektivitas informasi dan mendokumentasikan perubahan sikap dan perilaku pemilih. Dalam pemilu di tingkat nasional, strategi ini paling sulit dilakukan karena membutuhkan banyak uang dan tenaga. Namun, untuk pemilihan kepala daerah pendekatan ini mudah dilakukan.

b) Pemasaran Melalui Media Massa (*Pull Political Marketing*)

Strategi *Pull Political Marketing* adalah strategi yang paling banyak digunakan oleh partai dan kandidat. Pesan strategis ini disampaikan melalui media massa, antara lain cetak, *mobile*, elektronik, internet, dan luar ruang. Keuntungan dari strategi ini adalah kemampuan untuk menghujani audiens dengan informasi, tetapi efektivitasnya tidak dapat diukur. Karena memerlukan biaya yang sangat tinggi, strategi ini sering digunakan oleh partai politik atau kandidat yang kaya atau memiliki uang kampanye yang signifikan.

c) Pemasaran Melalui Tokoh, Kelompok atau Organisasi Berpengaruh (*Pass Political Marketing*)

Strategi yang terakhir adalah *pass political marketing*, strategi ini penyampaian pesan dilakukan melalui individu, kelompok atau organisasi yang mempunyai pengaruh. Strategi ini membutuhkan perhitungan atau kalkulasi yang hati-hati dalam melakukannya, karena jika terjadi kesalahan akan berakibat fatal (pesan komunikasi tidak akan diterima) atau bahkan ditolak. Pendekatan

untuk menjangkau dan melobi strategi ini perlu disesuaikan dengan tipe individu, kelompok dan organisasi. Satu transaksi tidak dapat digunakan untuk semua.

### **3. Partisipasi Politik Perempuan**

Berasal dari bahasa Latin, partisipasi terdiri dari dua kata yaitu "*Pars*" memiliki definisi "bagian" dan "*Capere*" memiliki definisi "mengambil". Jadi, partisipasi berarti ikut serta bagian dalam suatu kegiatan. Aristoteles percaya bahwa modal awal yang ditujukan untuk mencapai keadilan dan menjaga kepentingan rakyat adalah bentuk partisipasi dan hubungan antar manusia dalam suatu kelompok (Zaman, 2016). Partisipasi yang dimaksud menekankan pada hak setiap warga negara yang secara sadar ikut serta dalam menegakkan masyarakat, hukum, dan keadilan.

Politik bersumber dari bahasa Yunani "*Polis*" yang berarti "negara" dan "*Taia*" yang berarti urusan. Oleh karena itu, politik dapat diartikan sebagai urusan negara. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa semua bagian yang berhubungan dengan negara menjadi urusan negara. Lebih lanjut, pemahaman politik yang berkembang di Yunani pada saat itu dapat dijelaskan sebagai proses dimana manusia berinteraksi dengan manusia lain untuk kepentingan bersama (Husnul Abdi, 2021)

Miriam Budiarjo (Budiarjo, 2008) mengemukakan bahwa partisipasi politik berarti tindakan individu atau kelompok orang yang berkegiatan aktif dalam kehidupan politik dengan memilih pemimpin yang secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada kebijakan politik. Sedangkan menurut Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari masyarakat dalam pengambilan bagian dari proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pembentukan kebijakan umum (Budiarjo, 2008).

Partisipasi politik warga negara telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Seluruh warga negara berhak

berpartisipasi dalam politik, tidak terkecuali dengan perempuan. Namun partisipasi perempuan secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 39 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”

Dalam perjalanannya, partisipasi perempuan semakin diperjuangkan dan mendapatkan jaminan dalam undang-undang. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan “Pasal 65 (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Kedua, dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

Namun, peraturan afirmatif tersebut hanya terdapat pada jenjang pemilihan legislatif tidak untuk pemilihan eksekutif. Hingga saat ini masih belum ada kebijakan afirmatif yang mendukung kiprah perempuan terutama di jenjang eksekutif. Hal ini terbukti dalam kontestasi Pilkada 2020 masih belum ada peraturan yang mengakomodasi kuota partisipasi perempuan untuk ikut dalam pemilihan eksekutif (Marwah & Catur Pratiwi, 2022)

Tingkat partisipasi politik perempuan pada gelaran eksekutif memang masih bisa dibilang rendah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat 159 kandidat perempuan atau 11% dari total 1.432 yang lolos verifikasi pada Pilkada 2020. Rinciannya lima orang mencalonkan di tingkat provinsi, 26 orang di tingkat kota, dan 128 orang di tingkat kabupaten untuk seluruh posisi. Tingkat partisipasi tersebut hanya naik tipis dari tiga Pilkada

sebelumnya. Pada 2018 tercatat sebanyak 94 kandidat perempuan di seluruh jenjang dan posisi atau 8,2% dari total 1.140 calon. Lalu, pada 2017 hanya 45 atau 7,3% dari total 620 calon. Sementara pada 2015 sebanyak 123 atau 7,5% dari total 1.646 kandidat. Dalam Pilkada 2020, berdasarkan data Perludem, Golkar paling banyak mengusung kandidat perempuan di semua jenjang. Partai Beringin mengusung 37 orang calon kepala daerah dan 23 orang calon wakil kepala daerah perempuan. Terendah adalah Partai Garuda yang hanya mengusung satu orang calon kepala daerah perempuan (Ridhoi, 2020).

Dalam perjalanannya, tingkat keterpilihan perempuan dalam Pilkada dipengaruhi oleh isu-isu perempuan yang dibawa. Isu-isu ini dimasukkan kedalam visi misi ataupun program kerja. Menurut (Suhenty, 2020) menyebutkan bahwa setidaknya calon perempuan harus memiliki tiga faktor agar terpilih yaitu memiliki perspektif perempuan, lingkaran kekuasaan, dan latar belakang. Perspektif perempuan yang dimaksud adalah adanya kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dengan harapan akan menarik daya tarik para pemilih perempuan yang sering terpinggirkan baik dari segi partisipasi maupun ide dan gagasannya. Pada akhirnya, pola perilaku pemilih perempuan akan didominasi pendekatan psikologis dan rasional, mereka akan memilih kandidat perempuan yang memiliki perspektif perempuan dan memperjuangkan nasib perempuan, memiliki lingkaran kekuasaan yang kuat, rekam jejak yang kuat, dan memiliki basis sosial yang kuat.

#### **4. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilu atau pemilihan umum merupakan pilar dari sebuah sistem demokrasi. Suatu negara dapat disebut mengadopsi sistem demokrasi jika negara tersebut menggelar pemilu. Dalam ranah eksekutif, mengenal pemilihan umum presiden untuk tingkat nasional dan pemilihan umum kepala daerah untuk tingkat provinsi yaitu gubernur, tingkat kota yaitu walikota, dan tingkat kabupaten yaitu bupati.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada mempunyai tujuan untuk memilih pemimpin atau penguasa di level kabupaten/kota/provinsi. Pilkada di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Adanya pilkada ini sebagai wujud dari penerapan desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Pilkada merupakan momentum untuk memilih seorang pemimpin yang berkualitas dan mengerti akan daerahnya sendiri. Sehingga diharapkan mampu memunculkan potensi terbaik suatu daerah.

Dalam perkembangannya, gagasan mengenai Pilkada terbelah menjadi dua. Perbedaan gagasan ini muncul saat terjadi diskusi tentang Pilkada yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan pertama mengartikan jika Pilkada harus dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat. Hal ini berbeda dengan gagasan kedua yang mengartikan bahwa Pilkada dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menggunakan sistem representasi (Gazali, 2020)

Di era Orde Baru konsep pemilihan kepala daerah dilakukan dengan melewati DPRD bukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Pemilihan melewati DPRD ini nantinya juga harus menunggu restu dan ditunjuk oleh presiden. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa kepala daerah pada era Orde Baru bukan merupakan produk demokrasi secara nyata. Hal ini tidak mencerminkan demokrasi yang mempunyai arti oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Selepas reformasi, konsep ini mulai diubah seiring dengan gencarnya tuntutan desentralisasi.

Pemilihan umum langsung merupakan pilar penting dalam implementasi sebuah demokrasi. Sebuah negara tidak bisa mengklaim dirinya negara demokrasi jika tidak memberi ruang untuk terselenggaranya pemilihan umum langsung. Oleh sebab itu, pemilihan umum langsung dapat disebut sebagai jiwa dari demokrasi (Budhiati, 2020). Di Indonesia, pemilihan umum langsung skala daerah diatur pertama kali di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 sampai 119. Asas-asas dan tata cara pemilihan umum

menyiratkan secara jelas ketentuan bahwa Pilkada dilaksanakan secara langsung.

Dalam pencalonan pasangan di Pilkada terdapat beberapa syarat. Seperti dikemukakan (Y. R. Sari, 2022) bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 peserta Pilkada adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau independen yang didaftarkan atau mendaftarkan secara mandiri di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kandidat dengan syarat mencukupi kuota minimal 20% total kursi di DPRD atau 25% total suara dalam pemilihan umum anggota DPRD daerah tersebut. Jika maju jalur independen syarat minimal dukungan berbeda tiap daerah tergantung dengan jumlah penduduknya.

#### **G. Definisi Konsepsional**

Terdapat empat definisi konsepsional dari faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo di Pilkada Sleman Tahun 2020, yaitu:

##### **1. Modalitas**

Segala sumber daya yang dimiliki kandidat dalam mengarungi pemilihan kepala daerah, yaitu modal politik, modal sosial, modal ekonomi, dan modal kultural.

##### **2. Strategi Kampanye**

Strategi kampanye adalah rangkaian upaya kegiatan untuk merencanakan dan mempersiapkan arah serta tujuan dalam pemenangan kandidat di kontestasi politik.

##### **3. Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi politik perempuan adalah keikutsertaan perempuan dalam berpolitik baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah dijamin dalam Undang-Undang.

##### **4. Pemilihan Kepala Daerah**

Pilkada adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang berada di level kota/kabupaten/provinsi. Pilkada diselenggarakan sesuai Pancasila, UUD 1945, dan asas pemilu.

## **H. Definisi Operasional**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo di Pilkada Sleman Tahun 2020, dilihat dari dua faktor yaitu modalitas dan strategi kampanye. Masing-masing faktor tersebut dijelaskan seperti dibawah.

1. Modalitas, yang terdiri dari
  - a. Modal Politik, diukur dari
    - 1) Dukungan partai politik
  - b. Modal Sosial, diukur dari
    - 1) Ketokohan
    - 2) Jaringan
    - 3) Interaksi sosial
  - c. Modal Ekonomi, diukur dari
    - 1) Besaran kekayaan pribadi
    - 2) Dana kampanye
  - d. Modal Kultural, diukur dari
    - 1) Penghargaan individu
2. Strategi Kampanye, yang terdiri dari
  - a. Push Marketing, diukur dari
    - 1) Visi-misi
    - 2) Program yang ditawarkan
    - 3) Strategi komunikasi
  - b. Pull Marketing, diukur dari
    - 1) Penggunaan media sosial
    - 2) Penggunaan media cetak
    - 3) Penggunaan TV
  - c. Pass Marketing, diukur dari

- 1) Dukungan dari tim sukses
- 2) Dukungan dari tokoh masyarakat atau elit

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif menurut (Nazir, 2014) adalah sebuah metode dalam penelitian untuk mengkaji suatu peristiwa, suatu objek, suatu pemikiran, status kumpulan manusia di masa kini. Penelitian deskriptif mempunyai tujuan yaitu sebagai gambaran ataupun rangkaian yang sistematis, akurat serta faktual dalam fakta-fakta, relasi sifat dan fenomena, serta pembuatan deskripsi akan suatu hal yang diselidiki. Penulis mencari dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan Kustini Sri Purnomo sebagai bupati wanita pertama di Pilkada Sleman 2020 sehingga hasil penelitian tersebut akan digambarkan dengan uraian serta gambaran yang akan memudahkan pembaca mengerti dan menerima informasi yang disajikan.

### **2. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2018) Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data dan diserahkan langsung ke peneliti. Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau dari mana subjek penelitian dilakukan. Peneliti mendapatkan hasil olahan wawancara dari sumber yang nantinya digunakan oleh peneliti menjadi data primer. Data primer didapat langsung dari sumber pertama dengan wawancara. Data tersebut adalah:

#### **1. Data tentang Kustini Sri Purnomo**

Data tentang informasi-informasi mengenai Kustini Sri Purnomo seperti profil, program-program, visi misi, atau kebijakan yang ditawarkan kepada pemilih.

#### **2. Data partai pengusung**

Data tentang strategi yang dipakai partai pengusung yang berperan dalam kemenangan Kustini Sri Purnomo.

b. Data Sekunder

Sedangkan merujuk (Sugiyono, 2018) data sekunder adalah pengumpulan data dengan sumber data yang tidak langsung seperti dokumen atau arsip. Penulis mencari data sekunder dari buku, jurnal, arsip, ataupun media cetak atau online yang relevan dengan kampanye Kustini Sri Purnomo di Pilkada Sleman 2020.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data kegiatan kampanye

Data tentang kegiatan-kegiatan Kustini Sri Purnomo saat kampanye di Kabupaten Sleman

2. Gambar atau foto-foto terkait

Data gambar kegiatan terkait seperti promosi melalui media massa atau online

3. Data Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan di mana dua orang bertukar informasi dan ide dalam format tanya jawab yang dapat direduksi menjadi kesimpulan atau implikasi dari topik tertentu (Sugiyono, 2018). Wawancara dilakukan kepada pengurus DPC PDIP Sleman dan DPD PAN Sleman sebagai partai pengusung bupati terpilih di Pilkada Sleman Tahun 2020. Adapun target wawancara yaitu:

1. Koeswanto selaku Ketua DPC PDIP Sleman

2. Raudi Akmal selaku Ketua DPD PAN Sleman dan Ketua Tim Sukses

#### b. Dokumentasi

Studi dokumentasi menurut (Sugiyono, 2018) Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan manusia, foto, atau karya monumental. Dokumen tertulis seperti buku harian, kisah hidup, sejarah, biografi, dan aturan kebijakan. Hal ini juga diungkapkan oleh (Moleong, 2010) yang mengungkapkan bahwa penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dokumentasi di penelitian bersumber dari data KPU Kabupaten Sleman dan KPU Republik Indonesia. Selain itu juga dari media cetak/online/massa.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut (Moleong, 2010) analisis kualitatif merupakan teknik penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang individu atau kelompok dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata tertulis dan lisan. Analisis data (Sugiyono, 2018) adalah proses mengumpulkan dan merangkai secara sistematis informasi dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Menurut (Huberman & Milles, 1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### b. Penyajian Data

Miles & Huberman mendefinisikan penyajian menjadi kumpulan informasi terorganisir guna menarik kesimpulan dan memberikan kesempatan

untuk bertindak. Mereka percaya bahwa penyajian yang optimal merupakan sarana penting dari analisis kualitatif yang efektif, ini termasuk jenis grafik, bagan, jaringan, dan matrik.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman, kesimpulan hanyalah bagian dari kegiatan dalam konfigurasi lengkap. Kesimpulan juga divalidasi selama penelitian.